



Implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya

Joceline Larissa Pratama Ginting¹, Anggi Defira Marchegiani², Annisa Aulia Rahmah³, Legina Ayu Puspita⁴, Melanika Netta Anggraini⁵, Tjitjik Rahaju⁶, Ardiyansah⁷

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: 24040674144@mhs.unesa.ac.id; 24040674165@mhs.unesa.ac.id;

24040674158@mhs.unesa.ac.id; 24040674140@mhs.unesa.ac.id; 24040674159@mhs.unesa.ac.id;

tjitjikrahaju@unesa.ac.id; ardiansyah@unesa.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 13 Mei 2026

ABSTRACT

The Intensive Work Program (Program Padat Karya) forms part of the government's strategy to tackle unemployment, especially in urban areas dominated by informal employment. In Manyar Sabrangan Village, it is vital due to scarce sustainable job opportunities. This study examines the program's implementation and evaluates its effectiveness in lowering local unemployment rates through a qualitative descriptive research design. Data collection involved observations, in-depth interviews, and documentation from key stakeholders involved in program execution. Findings reveal that the program has been sufficiently effective in offering temporary employment, enhancing community incomes, fostering participation in productive economic activities, and reinforcing the local government's role as a facilitator. Nevertheless, implementation faces obstacles such as inconsistent policy communication, inadequate human resource capabilities, and the absence of robust monitoring systems and standard operating procedures. Moreover, the program's emphasis on short-term gains prevents communities from achieving full long-term economic self-reliance. In conclusion, while effective as a short-term solution, the program necessitates strengthened systems and sustained policy support to yield more optimal, enduring results.

Keywords: Labor-Intensive Program, Policy Implementation, Unemployment, Community Empowerment.

ABSTRAK

Program Padat Karya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran, khususnya di wilayah perkotaan dengan tingkat pekerjaan informal yang tinggi. Di Kelurahan Manyar Sabrangan, program ini menjadi relevan dalam menjawab keterbatasan akses masyarakat terhadap pekerjaan tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Padat Karya serta menilai efektivitasnya dalam mengurangi pengangguran di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Padat Karya telah berjalan cukup efektif dalam menyediakan lapangan kerja sementara dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi

produktif serta memperkuat peran pemerintah kelurahan sebagai fasilitator. Namun, implementasi program masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi kebijakan yang belum optimal, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, serta belum adanya sistem pengawasan dan standar operasional prosedur yang jelas. Selain itu, program masih cenderung berorientasi jangka pendek dan belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Program Padat Karya efektif sebagai solusi sementara, namun memerlukan penguatan sistem dan keberlanjutan kebijakan agar dampaknya lebih optimal.

Kata Kunci: Program Padat Karya, Implementasi Kebijakan, Pengangguran, Pemberdayaan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Masalah pengangguran masih menjadi isu utama dalam pembangunan nasional Indonesia, terutama terkait upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun pertumbuhan ekonomi cenderung positif, peningkatan itu belum sepenuhnya menyerap tambahan angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 4,76%, dengan jumlah angkatan kerja lebih dari 153 juta orang. Akibatnya, sekitar 7,28 juta penduduk belum mendapatkan pekerjaan (BPS, 2025). Situasi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja, yang berpotensi memicu masalah sosial-ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta rendahnya kualitas hidup masyarakat.

Table : 1 Tingkat Pengangguran dan Angkatan Kerja Nasional Indonesia (Februari 2025)

No.	Indikator	Nilai
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,76%
2.	Jumlah Angkatan Kerja	153 juta orang
3.	Perkiraan Jumlah Penganggur	± 7,28 juta orang

Di tingkat provinsi, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur relatif lebih baik daripada nasional, dengan TPT sebesar 3,61% pada periode yang sama. Meski begitu, pengangguran tetap menjadi tantangan serius, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum terserap pasar kerja, termasuk lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi (BPS Jawa Timur, 2025). Di Kota Surabaya, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, tingkat pengangguran memang menurun signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari 9,79% pada 2020 menjadi 4,91% pada 2024 (BPS Kota Surabaya, 2024). Namun, penurunan ini belum menandakan kondisi ideal, karena banyak masyarakat masih bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak stabil dan minim jaminan pekerjaan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ketenagakerjaan tidak hanya soal jumlah lapangan kerja, melainkan juga kualitas pekerjaan yang tersedia.

Tabel : 2 Perbandingan Tingkat Pengangguran Nasional dan Provinsi Jawa Timur (Februari 2025)

Wilayah	TPT (%)	Jumlah Angkatan Kerja
Indonesia	4,76%	153 juta orang
Jawa Timur	3,61%	24,76 juta orang

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan strategis guna menanggulangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Program Padat Karya, yang dirancang untuk menyediakan pekerjaan sementara melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan produktif berbasis komunitas (Sari, 2021; Hidayati, 2022). Program ini tidak hanya menyerap tenaga kerja jangka pendek, tetapi juga memberdayakan masyarakat lewat peningkatan keterampilan dan pengalaman kerja. Secara nasional, program tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menekankan peran pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian, program ini menjadi wujud nyata kebijakan publik untuk menangani pengangguran secara langsung.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Surabaya menjalankan Program Padat Karya sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Program ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2025. Aturan tersebut menargetkan percepatan pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta pembukaan peluang kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksananya memanfaatkan aset daerah dan melibatkan masyarakat langsung dalam kegiatan ekonomi produktif, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Pendekatan ini menjadikan program tidak hanya solusi sementara, tetapi juga langkah menuju kemandirian ekonomi masyarakat secara bertahap.

Beberapa studi menunjukkan bahwa Program Padat Karya berhasil membuka peluang kerja bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan, terutama untuk kelompok berpenghasilan rendah. Program ini juga dianggap sebagai langkah awal untuk membangun pengalaman kerja dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Meskipun demikian, pelaksanaannya di berbagai daerah masih menghasilkan dampak jangka pendek, karena keterbatasan penguatan kapasitas dan keberlanjutan program. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan Program Padat Karya tidak hanya bergantung pada kebijakan itu sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh cara implementasinya di tingkat lokal.

Salah satu kawasan yang layak dikaji dalam hal ini adalah Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Wilayah tersebut memiliki masyarakat dengan latar belakang sosial-ekonomi yang beraneka ragam, didominasi pekerjaan di sektor informal dan pendapatan yang tidak stabil. Situasi ini menjadikan Program Padat Karya sebagai pilihan kebijakan penting untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan warga setempat. Di samping itu,

pelaksanaan program di tingkat kelurahan menjadi kunci utama untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Fokus utamanya adalah proses pelaksanaan program serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di tingkat lokal. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan memberikan data empiris tentang pelaksanaan kebijakan, sekaligus masukan evaluasi bagi pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas Program Padat Karya dalam mengurangi pengangguran secara lebih berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam terkait dengan pelaksanaan Program Padat Karya sebagai salah satu upaya pemerintah dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial yang terjadi di lapangan secara lebih komprehensif melalui proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi mengenai proses pelaksanaan program, keterlibatan masyarakat, serta berbagai dinamika yang muncul selama kegiatan berlangsung. Desain penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi, proses, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan implementasi program pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Manyar Sabrangan yang berada di wilayah Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Penelitian difokuskan pada implementasi Program Padat Karya dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program, seperti aparatur kelurahan serta masyarakat yang menjadi peserta kegiatan. Informan dipilih secara purposive agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah, laporan kegiatan, serta referensi ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan terkait pelaksanaan Program Padat Karya di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas yang berlangsung di lapangan, termasuk partisipasi masyarakat serta proses pelaksanaan program oleh pihak kelurahan. Sementara itu, dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan program tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap

reduksi data dilakukan dengan memilih serta mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian agar data menjadi lebih terarah dan mudah dipahami. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif deskriptif sehingga hubungan antar informasi dapat terlihat dengan jelas dan pola-pola yang muncul dari hasil penelitian dapat dipahami secara lebih mendalam (Matthew B. Miles, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Padat Karya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya berjalan dengan melibatkan berbagai aktor, yaitu kelurahan, LPMK, RT/RW, pengelola program, dan masyarakat sebagai tenaga kerja. Berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan, program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dengan memanfaatkan aset pemerintah kota yang dialihfungsikan menjadi unit usaha produktif seperti carwash, kafe, cuci sepeda motor, dan penjualan jajanan. Temuan lapangan mengungkap bahwa penyebaran informasi program dilakukan melalui jaringan RT/RW menggunakan media komunikasi seperti grup WhatsApp dan pertemuan warga. Proses rekrutmen peserta bersifat fleksibel dan dilakukan melalui musyawarah antara pengelola program, LPMK, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi calon peserta. Dalam satu periode, jumlah pendaftar berkisar antara 5 hingga 30 orang, dengan jumlah peserta yang diterima sekitar 17 hingga 20 orang sesuai kebutuhan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas peserta merupakan masyarakat usia produktif yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Pendapatan yang diperoleh dari program berkisar antara Rp3.000.000 hingga Rp3.500.000 per bulan, tergantung jumlah pelanggan dan intensitas kerja. Unit usaha carwash menjadi sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja. Pengelolaan program dilakukan melalui sistem pelaporan bulanan oleh pengelola kepada kelurahan yang kemudian diteruskan ke pemerintah kota. Selain itu, terdapat monitoring dari dinas terkait setiap tiga bulan serta evaluasi internal secara rutin.

Hasil analisis menunjukkan bahwa program ini berhasil melibatkan masyarakat secara langsung dalam aktivitas ekonomi produktif. Peserta yang sebelumnya menganggur kini berpartisipasi dalam operasional usaha dan memperoleh penghasilan darinya. Program ini menjadi sumber pencaharian bagi warga setempat serta membuka peluang kerja bagi kelompok yang sulit masuk ke sektor formal. Meski demikian, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah kendala, seperti fluktuasi pelanggan yang memengaruhi pendapatan, keterbatasan keterampilan tenaga kerja, penerapan standar kerja yang belum optimal, persaingan dengan usaha serupa di sekitar, serta fasilitas pendukung yang terbatas.

Program Padat Karya di Kelurahan Manyar Sabrangan adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan di tingkat daerah, khususnya mengenai masalah pengangguran, kesulitan mendapatkan pekerjaan resmi, serta dominasi sektor informal yang memiliki penghasilan yang tidak pasti.

Secara keseluruhan, program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan tambahan. Namun, jika dianalisis lebih dalam, program ini tetap menunjukkan kecenderungan sebagai solusi sementara yang berfungsi sebagai penyangga ekonomi bukan sebagai kebijakan yang mampu mendorong perubahan struktur ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan lebih fokus pada penyerapan tenaga kerja daripada pada peningkatan kualitas serta kemandirian ekonomi masyarakat (Hidayati, 2022; Jannah et al., 2023).

Evaluasi dan Keterbatasan Program Padat Karya

Dari sudut pandang kebijakan publik, suatu kebijakan seharusnya tidak hanya berhenti pada pembuatan tujuan tetapi juga harus bisa diterapkan dengan baik sesuai dengan kondisi masyarakat (Dunn, 2004). Namun dalam pelaksanaan Program Padat Karya, terlihat adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang bersifat jangka panjang dengan praktik implementasi di lapangan yang cenderung bersifat jangka pendek. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya dibuat berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat yang menjadi sasaran, sehingga pelaksanaannya lebih bersifat formal dan belum mampu memberikan hasil yang maksimal. Ini sesuai dengan pandangan bahwa kegagalan suatu kebijakan biasanya bukan karena cara penyusunannya, melainkan karena bagian pelaksanaannya (Dye, 2013).

Dilihat dari segi komunikasi, cara menyampaikan informasi program melalui jaringan RT/RW justru membuat prosesnya lebih mudah untuk mencapai masyarakat. Namun, pola komunikasi yang terjadi masih hanya berupa pemberian informasi secara teknis dan belum bisa membentuk pemahaman yang dalam mengenai tujuan program tersebut. Masyarakat umumnya melihat program tersebut hanya sebagai peluang kerja sementara, bukan sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan diri. Selain itu, kurangnya standar kriteria dalam proses rekrutmen menunjukkan bahwa kebijakan tidak jelas dalam penerapannya. Kondisi ini bisa menyebabkan perbedaan pemahaman saat pelaksanaan, bahkan mungkin menciptakan kesempatan terjadinya ketidakadilan dalam proses perekrutan peserta. Oleh karena itu, komunikasi dalam program ini belum bisa berjalan dengan baik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara maksimal.

Dalam hal sumber daya, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara keadaan sarana fisik yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang dimiliki. Dari segi sarana, program tersebut sudah menggunakan aset pemerintah daerah seperti usaha carwash, kafe, dan kegiatan ekonomi lainnya dengan cukup baik. Namun, dari segi sumber daya manusia, kualitas para pekerja masih menjadi masalah utama. Kurangnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja peserta menunjukkan bahwa program tersebut belum berhasil meningkatkan kemampuan masyarakat secara berarti. Pelatihan yang diberikan masih terbatas dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemampuan peserta. Kondisi ini menunjukkan bahwa program lebih

berperan sebagai alat untuk menyerap tenaga kerja daripada sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa program padat karya biasanya belum mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan (Rouf et al., 2022; Permatasari, 2021).

Dalam hal pelaksanaan kebijakan, komitmen untuk menjalankan program terlihat dari adanya kegiatan evaluasi dan pelaporan yang dilakukan secara rutin. Namun, komitmen tersebut belum diiringi dengan sistem pengawasan yang efektif. Masih ada masalah mengenai disiplin kerja, seperti terlambat masuk dan kurangnya rasa tanggung jawab dalam melakukan tugas. Selain itu, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran menunjukkan bahwa aturan yang sudah ada belum diterapkan secara konsisten. Pelaksanaan kebijakan tersebut masih kurang baik dalam hal pengendalian. Dalam kajian kebijakan publik, lemahnya pengawasan dapat mengurangi tingkat kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan (Kurhayadi, 2020). Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada komitmen, tetapi juga pada kemampuan untuk menerapkan aturan secara konsisten.

Dalam hal struktur birokrasi, pelaksanaan Program Padat Karya menunjukkan adanya kerja sama yang cukup baik antara kelurahan, LPMK, RT/RW, dan masyarakat. Koordinasi yang baik menjadi salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Namun, kelemahan terbesar adalah belum maksimalnya penerapan prosedur operasional standar. Proses rekrutmen, pengawasan, dan kelanjutan program yang kurang jelas menunjukkan bahwa sistem pelaksanaannya belum terorganisasi dengan baik. Selain itu, ketergantungan pada aset pemerintah yang bersifat sementara dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap keberlanjutan program di masa depan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum memiliki sistem yang cukup baik untuk memastikan keberlanjutan dalam jangka waktu yang lama (Ridhotuloh et al., 2024). Ketika dilihat dari pencapaian yang lebih luas, keberhasilan sebuah program biasanya dinilai berdasarkan berapa banyak tenaga kerja yang berhasil diterima. Namun, ukuran tersebut belum mampu menjelaskan keberhasilan secara lengkap. Jumlah tenaga kerja yang banyak tidak selalu berarti pendapatan atau kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan. Dapat dilihat dari kondisi pengangguran yang masih menjadi masalah baik di tingkat nasional maupun daerah (BPS, 2025; BPS Jawa Timur, 2025). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program padat karya belum mampu memberikan perubahan yang mendasar terhadap struktur ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan adanya masalah dasar dalam arah kebijakan. Program tetap memperhatikan hasil yang bisa diukur, seperti jumlah orang yang bekerja, tetapi tidak memperhatikan bagaimana baik atau buruk hasilnya. Akibatnya, program ini bisa membuat masyarakat jadi bergantung pada bantuan pemerintah, bukan mendorong mereka untuk mandiri secara ekonomi. Jika situasi ini terus berlangsung, maka program padat karya hanya akan menjadi kebijakan yang diulang-ulang tanpa memberikan perubahan yang nyata. Selain itu,

keterbatasan dalam perencanaan keberlanjutan program juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Program masih belum memiliki arah kemajuan yang terperinci setelah peserta selesai mengikuti kegiatan tersebut. Tidak adanya tindak lanjut berupa pengembangan usaha, pelatihan, atau akses terhadap peluang kerja lain menunjukkan bahwa program tersebut belum dirancang sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih bersifat sementara dan belum bisa memberikan dampak yang berkelanjutan kepada masyarakat.

Secara umum, Program Padat Karya di Kelurahan Manyar Sabrangan berhasil memberikan dampak ekonomi dalam jangka pendek, terlihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat dan partisipasi mereka dalam kegiatan yang produktif. Namun, jika dianalisis secara mendalam, program ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan terutama dalam hal komunikasi, sumber daya manusia, pengawasan, dan sistem birokrasi. Program belum bisa memberi kemandirian ekonomi bagi masyarakat karena belum ada peningkatan kemampuan yang cukup dan rencana kelanjutan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Pertama, harus dibuat aturan perekrutan yang jelas dan terbuka agar semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program tersebut. Kedua, program tersebut harus dilengkapi dengan pelatihan yang terus-menerus agar bisa meningkatkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki peserta. Ketiga, sistem pengawasan harus diperkuat dengan menerapkan aturan dan sanksi yang ketat agar disiplin tetap terjaga. Keempat, perlu dirancang arah keberlanjutan program yang mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga program tidak hanya berhenti pada penyerapan tenaga kerja sementara. Dengan demikian, Program Padat Karya diharapkan bukan hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga bisa menjadi bagian dari rencana pembangunan ekonomi masyarakat yang lebih berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Manyar Sabrangan telah memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja sementara dan peningkatan pendapatan masyarakat. Program ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif serta memperkuat peran pemerintah kelurahan sebagai fasilitator. Meskipun demikian, efektivitas program masih belum optimal karena adanya kendala dalam komunikasi kebijakan, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, serta belum tersedianya sistem pengawasan dan standar operasional prosedur yang jelas. Selain itu, orientasi program yang cenderung jangka pendek menyebabkan dampaknya terhadap kemandirian ekonomi masyarakat masih terbatas. Program Padat Karya dapat dinilai efektif sebagai solusi sementara dalam penanggulangan pengangguran, namun memerlukan penguatan pada aspek sistem, kualitas pelaksanaan, dan keberlanjutan kebijakan agar dapat memberikan dampak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu,

disarankan adanya pengembangan mekanisme pelatihan keterampilan, perbaikan sistem pengawasan, serta penyusunan standar operasional prosedur yang lebih terstruktur. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji strategi pengembangan program yang berorientasi jangka panjang serta mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat secara lebih mendalam.

DAFTAR RUJUKAN

- Ananda, Y. F., & Hardjati, S. (2025). Implementasi program padat karya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di Kampung Batik Tin Gundih. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 7(9), 2652–2660. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v7i9.8580>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,76 persen, rata-rata upah buruh sebesar 3,09 juta rupiah*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2432/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-76-persen--rata-rata-upah-buruh--sebesar-3-09-juta-rupiah->
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2024). *Kota Surabaya dalam angka 2024*. <https://surabayakota.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025). *Februari 2025: Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,61 persen di Jawa Timur*. <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/1495/februari-2025-tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-sebesar-3-61-persen-di-jawa-timur->
- Dunn, W. N. (2004). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Pearson Prentice Hall.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hidayati, N. (2022). Pemberdayaan usaha mikro melalui program padat karya: Studi kasus di Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 45–58.
- Jannah, S. R., et al. (2024). Pemberdayaan melalui program padat karya di Kecamatan Kenjeran Surabaya. *Praja Observer*. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/2145>
- Kurhayadi. (2020). Public policy implementation: A theoretical review. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/23742>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mulyono. (2009). *Implementasi kebijakan*. <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/01/implementasi-kebijakan/>
- Permatasari, I. A. (2021). Program padat karya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*.

-
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya*. <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4357>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2025). *Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya tentang Program Padat Karya*. <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4610>
- Pemerintah Kota Surabaya. (n.d.). *Surabaya catat penurunan drastis TPT dan kemiskinan berkat program padat karya*. <https://surabaya.go.id/id/berita/23199/surabaya-catat-penurunan-drastis-tpt-dan-kemiskinan-berkat-program-padat-karya>
- Ridhotuloh, W., Hidayat, A. R., Oktavio, R. F., Arzaq, M. N., & Kurniawan, S. E. (2024). Model-model kebijakan publik: Pendekatan dan implementasi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/2664>
- Rouf, A., et al. (2024). Implementasi program padat karya di Kelurahan Pegirian Surabaya. *Praja Observer*. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1789>
- Sari, R. (2021). Program padat karya sebagai upaya penanggulangan pengangguran masyarakat.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013/uu-no-13-tahun-2003>